

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang ditandai oleh rendahnya rata-rata kualitas hidup penduduk, pendidikan, kesehatan, gizi anak-anak, dan sumber air minum. Beban kemiskinan sangat dirasakan oleh kelompok-kelompok tertentu seperti perempuan dan anak-anak yang berakibat pada terancamnya masa depannya karena kekurangan gizi, dan rendahnya tingkat pendidikan (Simanjuntak, 2010). Kemiskinan merupakan suatu masalah yang dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat (Dirjen PMD Depdagri, 2003) dalam (Parnamian, 2010).

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir bahwa kondisi kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan cukup tinggi, walaupun secara statistik ada sedikit penurunan, namun jumlah penduduk tinggi berada dalam kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id), pada Maret 2017 penduduk miskin tercatat 27,77 juta atau 10,64%. Selanjutnya pada Maret 2018 jumlah penduduk miskin tercatat 25,95 juta orang atau 9,82%. Pada periode Maret 2019 jumlah penduduk miskin 25,14 juta orang atau 9,41%. Kemudian pada Periode September 2019 jumlah penduduk miskin 24,79 juta orang atau 9,22%. Terakhir pada periode Maret 2020 jumlah penduduk miskin 26,42 juta orang atau 9,78%. Sedangkan pada periode September jumlah penduduk miskin 27,55 juta orang atau 10,19%. Sehingga bisa dikatakan bahwa kemiskinan di Indonesia, berdasarkan survei ekonomi nasional September 2020 bahwa presentase penduduk miskin meningkat.

Dari data BPS (www.bps.go.id) Kelompok kemiskinan ini terbagi dua, yaitu perkotaan dan pedesaan. Jumlah orang miskin di daerah perkotaan periode 2018 tercatat 10,14 juta turun 128,2 ribu orang dibandingkan periode September 2017 sebesar 10,27 juta. Sementara itu di daerah pedesaan turun sebanyak 505 ribu orang dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang menjelaskan bahwa kondisi kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan

50%. Sedangkan dari segi persentase penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat 7,02% lebih rendah dibanding periode September 2017 sebesar 7,26%. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 13,47%, turun menjadi 13,20% pada Maret 2018. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2020 sebesar 7,38%, naik menjadi 7,88% pada September 2020. Sedangkan persentase pada Maret 2020 berjumlah 12,82%, naik menjadi 13,20% juta orang pada September 2020. Jadi apabila dibandingkan Maret 2020 jumlah penduduk miskin September 2020 perkotaan naik sebanyak 876,5 ribu orang, dari 11,16 juta orang pada Maret 2020 menjadi 12,04 juta orang pada September 2020. Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 249,1 ribu orang, dari 15,26 juta orang pada Maret 2020 menjadi 15,51 juta orang pada September 2020.

Bila dilihat pada periode 2010 sampai September 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun presentase, namun pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, dan September 2020 justru tidak. Kenaikan jumlah dan presentase penduduk miskin pada periode September 2013 dan Maret 2015 diakibatkan oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara kenaikan jumlah dan presentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September disebabkan oleh adanya pandemic Covid-19 yang melanda Indonesia. Dengan mudahnya peningkatan jumlah keluarga miskin saat terjadi sedikit masalah, menunjukkan bahwa banyaknya jumlah penduduk dengan tingkat ekonomi diambang kemiskinan.

Selanjutnya juga dijelaskan Sumber data BPS untuk mengukur data kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran. Dengan pendekatan ini dapat dihitung *Headcount Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan sejak zaman orde baru hingga era reformasi di bawah

kepemimpinan presiden Joko Widodo. Kita lihat saja program penanggulangan kemiskinan pada tahun (1970-1998) masa kepemimpinan presiden Soeharto, telah menggelontorkan program penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:

1. Inpres desa tertinggal
2. Program bantuan kesejahteraan fakir miskin
3. Program keluarga muda mandiri
4. Program peningkatan peranan wanita
5. Pengembangan karang taruna dan asistensi keluarga miskin
6. Peningkatan intensifikasi pertanian tanaman pangan
7. Program pendidikan dan kesehatan
8. Pembinaan usaha kecil kredit candak kulak
9. Program transmigrasi
10. Tabungan kesejahteraan keluarga (Takesra) dan kredit usaha kesejahteraan keluarga (kukesra)

Selanjutnya program penanggulangan kemiskinan pada tahun 1998-1999 masa kepemimpinan presiden BJ Habibie antara lain:

1. Program jaringan penyelamatan sosial (JPS)
2. Beras subisidi untuk masyarakat
3. Dana untuk pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan sejatera
4. Beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu
5. Program padat karya

Selanjutnya program penanggulangan kemiskinan pada tahun 2000-2001 masa jabatan presiden Abdurahman Wahid atau yang dikenal Gusdur sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat miskin
2. Perbaikan lingkungan rumah tinggal
3. Pengembangan budaya usaha masyarakat miskin
4. Subisidi air bersih
5. Kompensasi kenaikan harga BBM di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan angkutan umum

Selanjutnya program penanggulangan kemiskinan pada tahun 2001-2004 masa jabatan presiden Megawati sebagai berikut:

1. Listrik murah untuk rumah tangga miskin
2. Subsidi untuk masyarakat kurang mampu
3. Subsidi bunga untuk program kredit usaha mikro
4. Subsidi pupuk
5. Pelayanan kesehatan

Selanjutnya program penanggulangan kemiskinan pada tahun 2004-2014 masa jabatan presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai berikut:

1. Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri
2. Program keluarga harapan (PKH)
3. Subsidi besar untuk masyarakat miskin (raskin)
4. Bantuan siswa miskin (BSM)
5. Program Askeskin/jamkesmas
6. Program bantuan langsung tunai (BLT)
7. Program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM)

Selanjutnya program penanggulangan kemiskinan pada tahun 2014-2019 masa jabatan presiden Joko Widodo sebagai berikut:

1. Program indonesia pintar (PIP)
2. Program indonesia sehat (PIS)
3. Program Keluarga Harapan (PKH)
4. Beras sejahtera (rastra)/ bantuan sosial pangan
5. Bantuan pangan non tunai (BPNT)
6. Program dana desa
7. Program reforma agraria dan perhutanan sosial (RAPS)

Selanjutnya kita ketahui juga bahwa dunia dilanda pandemi covid-19 yang dimulai pada pertengahan 2019 dan sangat mencekam pada tahun 2020. Akan tetapi pemerintah masih berupaya menanggulangi kemiskinan di era adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi covid-19. Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada masyarakat.

Dari begitu banyaknya program pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya dapat mengentaskan kemiskinan baik itu diperkotaan maupun di perdesaan. Menurut Ahmad Taufiq dalam (Solikatum, 2014) bahwa adanya kelemahan mendasar yang menganggap warga miskin hanya membutuhkan modal atau bantuan cuma-cuma dari pemerintah dianggap menjadi penyebab kegagalan program pengentasan kemiskinan tersebut.

Kondisi angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin pada bulan September 2020. Ditegaskan juga oleh koordinator fungsi statistik sosial BPS Provinsi Sumatera Barat Krido Saptono melihat pada bulan September 2020, jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat mencapai 364,79 ribu orang atau 6,56% hal ini disebabkan karena kondisi covid-19 yang melanda.

Sedangkan untuk Kabupaten Pesisir Selatan, angka kemiskinan dalam tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Berdasarkan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan) di Kabupaten Pesisir Selatan pada bulan Maret 2019 sebanyak 36,51 ribu atau 7,88% jiwa. Mengalami peningkatan sebanyak 1,59 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi bulan Maret 2018 yang sebanyak 34,92 ribu atau 7,59% jiwa. Dari data tersebut terlihat bahwa program pengentasan kemiskinan yang digelontorkan belum berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan. (www.pesselkab.go.id)

Upaya pengelolaan program pengentasan kemiskinan dijelaskan oleh Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bahwa, peraturan bupati tentang strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017-2021 yang dijelaskan pada Pasal 8 yaitu: prioritas penanggulangan kemiskinan meliputi:

1. Pemenuhan kebutuhan pangan dalam rangka meniadakan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang kekurangan makan.
2. Penurunan atau pengurangan kekurangan gizi pada balita.

3. Perawatan dan pengobatan gratis bagi penduduk miskin di lembaga kesehatan milik pemerintah atau pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pendidikan murah dan terjangkau sampai setingkat sekolah menengah atas.
5. Perwujudan iklim investasi yang kondusif dengan memberikan penghargaan bagi investor.
6. Pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di nagari dengan pola swakelola oleh masyarakat.
7. Verifikasi pendataan penduduk miskin Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan sasaran program.
8. Peningkatan penangan rumah tidak layak huni.
9. Peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum.

Dari beberapa upaya program penanggulangan kemiskinan yang telah diluncurkan oleh pemerintah belum sanggup untuk mengurangi angka kemiskinan. Menurut informasi awal pimpinan lokal, terlihat bantuan yang diberikan menimbulkan ketergantungan masyarakat akan bantuan. Banyak masyarakat miskin yang hanya menunggu bantuan datang, sehingga malas berusaha dan berharap akan terus mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sehingga masyarakat beranggapan dengan bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin akan bisa membantu untuk mengurangi angka kemiskinan yang terus meningkat di Kabupaten Pesisir Selatan. Informasi awal menyatakan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah tersebut belum tepat sasaran, terutama dalam memanfaatkan bantuan, kesannya bantuan itu untuk berfoya-foya bukan digunakan untuk sistem jangka panjang.

Nagari Sungai Pinang adalah salah satu nagari yang ada di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, memiliki angka kemiskinan cukup banyak, Dari hasil observasi awal yang dilakukan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi peningkatan angka kemiskinan. Dari jumlah kepala keluarga sebanyak 386 KK, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) tahun 2019 berjumlah 250 KK (64,7%). Pada tahun 2020 Rumah Tangga Miskin (RTM) masih tetap berjumlah 250 KK (64,7%). Akan tetapi pada tahun 2021 Rumah Tangga Miskin (RTM)

mengalami peningkatan dengan jumlah 300 KK dari jumlah penduduk 390 KK (76%).

Dari data tersebut kemiskinan di Nagari Sungai Pinang terlihat eksis di tengah masyarakat. Walau secara umum angka kemiskinan sudah sedikit berkurang di Kabupaten Pesisir Selatan, namun masalah ini terlihat menjadi masalah yang tetap muncul dan menjadimasalah sosial..

Secara umum program pengentasan kemiskinan yang digelontorkan pemerintah sampai ke Nagari. Pemerintah Nagari sendiri juga telah melakukan Program pengentasan kemiskinan baik bersifat materil dan non-materil. Program pengentasan kemiskinan bersifat materil seperti: bantuan rumah bedah berjumlah 65 unit, bantuan MCK masyarakat berjumlah 151 unit, bantuan seng masyarakat untuk 20 unit rumah, bantuan kilomter listrik berjumlah 50 unit, bantuan perahu dan mesin berjumlah 37 unit dan pada tahun 2021 akan ditambah sebanyak 30 unit, bantuan *biduak pukek* berjumlah 10 unit, terakhir bantuan jaring nelayan berjumlah 20 set. Sedangkan bantuan program pengentasan kemiskinan yang bersifat non-materil seperti: mengadakan pelatihan membuat mangrove, pelatihan pengolahan kopi mangrove, pelatihan jahit-menjahit (pembuatan alas meja, sajadah dan tempat tisu), dan terakhir pelatihan pembuatan makanan khas Nagari Sungai Pinang yaitu rakik maco lado hijau.

Terlihat bahwa masyarakat Nagari Sungai Pinang sudah cukup banyak mendapatkan bantuan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah. Akan tetapi hal yang terjadi adalah belum terlihat dampak program pengentasan kemiskinan terhadap penurunan angka kemiskinan di nagari. Maka dari itu menarik untuk diteliti bagaimana efektivitas program pengentasan kemiskinan di Nagari Sungai Pinang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data dari pemerintah Nagari Sungai Pinang, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir bahwa dari jumlah kepala keluarga sebanyak 386 KK, jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) tahun 2019 berjumlah 250 KK (64,7%). Pada tahun 2020 Rumah Tangga Miskin (RTM) masih tetap berjumlah 250 KK (64,7%). Akan tetapi pada tahun 2021 Rumah Tangga Miskin (RTM) mengalami

peningkatan dengan jumlah 300 KK dari jumlah penduduk 390 KK (76%). Data rumah tangga miskin ini masih dikategorikan cukup tinggi. Banyak program pengentasan kemiskinan yang masuk ke nagari, namun angka kemiskinan tidak kunjung berkurang. Maka Rumusan masalah penelitian ini adalah: **Bagaimana Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan Di Nagari Sungai Pinang, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan?**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengelolaan program pengentasan kemiskinan serta efektivitas program terhadap pengurangan angka kemiskinan di Nagari Sungai Pinang.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi implementasi dan masalah dalam pengelolaan program pengentasan kemiskinan di Nagari Sungai Pinang.
2. Menganalisis efektivitas program pengentasan kemiskinan terhadap peningkatan ekonomi keluarga di Nagari Sungai Pinang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu sosiologi dalam bidang pengentasan kemiskinan dan bidang pemberdayaan masyarakat.
2. Secara praktis penelitian ini memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan pemerintah nagari dalam pengelolaan program pengentasan kemiskinan dan dampaknya terhadap pengurangan angka kemiskinan di nagari.

